



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRIANA KRISNAWATI

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JAYADI

Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 07 August 2026

Pihak Pertama
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ANDRIANA KRISNAWATI

Pihak Kedua
Sekretaris Utama



JAYADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima	01 - Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.71 Persen
		02 - Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4.97 Nilai
		03 - Tingkat Tindak Lanjut pengaduan pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5 Nilai
2.	02 - Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan KIE dengan pedoman	01 - Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	93.42 Persen
3.	03 - Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pengendalian intern yang efektif	01 - Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	2 Dokumen
		02 - Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4.36 Nilai
4.	04 - Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum	01 - Indeks Reformasi Hukum	100 Nilai
		02 - Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	100 Persen
5.	05 - Meningkatnya efektifitas bantuan hukum	01 - Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100 Persen
6.	06 - Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	01 - Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	100 Persen
		02 - Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang dihasilkan	100 Persen
		03 - Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	94.15 Nilai
		04 - Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		05 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	100 Persen
		06 - Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	3.4 Nilai
7.	07 - Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima	01 - Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	94 Nilai
		02 - Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	93.75 Nilai
		03 - Indeks Pelayanan Publik BPOM	4.76 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 2,137,443,000 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4110 - Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	2,137,443,000

Jakarta, 07 August 2026

Pihak Pertama
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ANDRIANA KRISNAWATI

Pihak Kedua
Sekretaris Utama



JAYADI